

Pemetaan Kekuatan Organisasi Perempuan sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Pranata Lokal

Pinky Saptandari
(Universitas Airlangga)

Ringkasan

Pemetaan kekuatan organisasi perempuan di setiap komunitas merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat ditawar-tawar berkaitan dengan persiapan menyongsong otonomi daerah. Mengapa demikian? Antara lain disebabkan karena kaum perempuan sebagai sumberdaya manusia mempunyai peran fungsional dan strategis dalam kegiatan pembangunan dalam masyarakat. Jumlah kaum perempuan yang cukup dominan di setiap masyarakat, merupakan faktor penting yang tak boleh diabaikan. Cukup banyak bukti-bukti yang terkumpul tentang peran aktif perempuan dalam pembangunan masyarakat, yang tak saja berdampak positif terhadap dirinya, tetapi juga untuk masyarakat. Pengalaman membuktikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan akan dapat dicapai apabila dilakukan dalam kegiatan "Aksi Afirmatif", yakni memberikan porsi keutamaan, prioritas, kuota, untuk kaum perempuan agar dapat terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempunyai dampak meningkatkan posisi tawarnya dalam keluarga dan

masyarakat.

Pemberdayaan bermakna dua hal, yakni pengorganisasian dan pendidikan. Yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. Kegiatan koperasi yang sarat dengan kegiatan pengelolaan kelompok dan kemampuan manajemen keuangan merupakan salah satu langkah yang tepat dalam upaya pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Hal ini telah dibuktikan pada beberapa kegiatan koperasi perempuan/wanita yang mampu menunjukkan keberhasilan mengelola kegiatan koperasi secara profesional, dan dapat memberikan dampak kemandirian pada anggotanya.

Tulisan ini disusun dalam rangka : (a) melihat arti penting peta kekuatan organisasi perempuan di tingkat masyarakat, dalam berbagai aktivitasnya sebagai upaya pemberdayaan kaum perempuan, (b) menerapkan kerangka pemberdayaan perempuan dalam memotret kegiatan-kegiatan yang dikelola kaum perempuan, dalam rangka mencermati gerakan perempuan yang bergerak dalam pemberdayaan kaumnya.

Pelibatan kaum perempuan dalam program pembangunan memberikan kontribusi yang positif bagi upaya pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan berbagai upaya, antara lain: sosialisasi kesetaraan gender, perencanaan pembangunan berwawasan *gender*, serta pemetaan kekuatan organisasi perempuan, terutama dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha koperasi yang ada di setiap komunitas. Isu-isu lokal yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan sebagai kelompok rentan, perlu diangkat dan dapat dijadikan masukan bagi penyusunan program kerja bagi pranata-pranata yang ada (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemimpin daerah, LSM, serta organisasi-organisasi yang ada).

Pendahuluan

Perempuan Indonesia adalah kaum yang memiliki keragaman dalam menyikapi berbagai bentuk persoalan kemasyarakatan, namun juga memiliki kesamaan dalam berbagai bentuk diskriminasi, ketidak-adilan, pengabaian yang dialami. Untuk dapat memperjuangkan ketidak adilan yang dialami, kaum perempuan harus bersatu untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang seringkali terabaikan karena berbagai hambatan, terutama hambatan yang berasal dari kuatnya nilai ideologi patriarki.

Sejarah membuktikan bahwa kekuatan perempuan sebagai kelompok (baca: perkumpulan) baru benar-benar diperhitungkan setelah Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, yang dianggap sebagai era kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada saat itu pertama kali muncul kesadaran perempuan Indonesia atas kepentingannya yang berbeda dari rekan pejuang laki-laki, dimana pada saat itu mereka dapat berkumpul secara bebas untuk menentukan kehendaknya. Namun, secara konkrit kegiatan perempuan dalam kegiatan ekonomi baru

dimunculkan dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1941 di Semarang, yang salah satu keputusannya adalah membentuk empat badan pekerja, yakni: (1) pemberantasan buta huruf, (2) penyelidikan masalah tenaga kerja perempuan, (3) masalah perkawinan hukum Islam, (4) memperbaiki ekonomi perempuan Indonesia (Baca: Wieringa, 1999).

Setelah kurun waktu yang cukup panjang, pada tahun 2000 ini perlu dikaji secara kritis perkembangan gerakan perempuan Indonesia akhir-akhir ini. Kemanakah arahnya? Apa yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan kaum perempuan? Kegiatan apakah yang dirasakan cukup efektif untuk meningkatkan posisi tawar perempuan yang dapat meningkatkan akses dan peluang dalam berbagai bidang kehidupan, utamanya dalam menyongsong era paradigma baru pembangunan dan otonomi daerah?.

Tulisan ini bertujuan untuk: (1) melihat arti penting peta kekuatan dan peluang organisasi perempuan sebagai upaya pemberdayaan perempuan, (2) melihat apa dan bagaimana aktivitas yang dilakukan organisasi perempuan dalam kaitan dengan kerangka pemberdayaan perempuan.

Berorganisasi sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan perempuan

Langkah pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui jalur pengorganisasian dan jalur pendidikan. Dengan mempelajari gerakan perempuan yang ada, kita akan dapat mempunyai gambaran yang relatif utuh tentang kiprah perempuan dalam memperjuangkan dirinya. Untuk definisi gerakan perempuan, Weiringa (1999) mengatakan bahwa sulit untuk memperoleh definisi yang komprehensif., karena gerakan perempuan tidak pernah bicara dalam satu bahasa. Definisi yang luas kiranya lebih tepat untuk bisa menangkap heterogenitas dan kompleksitasnya.

Menarik untuk menyimak permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dari masa ke masa. Masalah yang dirasakan berat bagi kaum perempuan dari masa ke masa ada yang sama, terus menerus dijumpai, tetapi ada pula yang tidak sama. Pada awal abad XX beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai paling berat dirasakan kaum perempuan adalah: (a) pendidikan untuk perempuan, (b) penghapusan perkawinan anak dan perbudakan, (c) menentang pelacuran, (d) memberi kesempatan luas bagi perempuan untuk tampil di muka umum, (e) pendidikan seks, (f) upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, (g) perbudakan penghidupan petani, (h) pendidikan untuk perempuan tani. Bila kita cermati permasalahan yang teridentifikasi pada awal abad XX dengan apa yang terjadi di awal abad XXI ini, ternyata beberapa hal masih merupakan isu sentral yang belum banyak mengalami perubahan.

Pendidikan untuk perempuan menjadi keprihatinan pokok yang ditangani secara organisasi. Inilah yang kemudian menjadi dasar pendirian beberapa organisasi perempuan., selain juga bergerak dalam gerakan sosial, politik, dan agama.

Fakta sejarah mencatat bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setidaknya ada dua tujuan perempuan berorganisasi, yaitu: (i) mencari pemecahan persoalan, dan (ii) mempunyai unsur meningkatkan kesadaran. Sejauh mana aktivitas yang dilakukan organisasi perempuan selama ini dapat menjangkau dua tujuan tersebut? Beberapa penelitian yang secara khusus menyoroti gerakan kaum perempuan melalui berbagai organisasi, menyimpulkan bahwa organisasi perempuan di Indonesia mengalami kemajuan dalam kuantitas, namun mengalami kemunduran dalam kualitas sejak orde baru. Kemampuan organisasi untuk mencapai dua tujuan termaksud semakin pudar, karena lebih menitikberatkan pada kegiatan seremonial yang menekankan peran perempuan sebagai ibu. Konsep ibuisme dalam organisasi perempuan versi Orde Baru telah berhasil menempatkan organisasi perempuan tersebut sebagai pranata yang melestarikan ideologi dominan dari ideologi patriarki. Dalam situasi semacam itu, tak mengherankan apabila organisasi perempuan yang berkembang menjadi besar adalah organisasi yang berhubungan dengan jabatan suami, alias organisasi isteri, seperti: . Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, IIDI, PKK, dan yang sejenis.

Ideologi gender banyak mempengaruhi tingkah laku perempuan dalam berserikat dan berorganisasi. Apa yang dimaksud dengan ideologi gender?. Ideologi gender dapat diartikan sebagai bagaimana laki-laki dan perempuan didefinisikan, dinilai, dipersepsikan, dan diharapkan untuk bertingkah laku. Secara lebih konkrit ideologi gender adalah segala aturan, nilai, mitos, dan stereotipe yang mengatur hubungan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didahului pembentukan identitas feminin dan maskulin.

Bagaimana ideologi hegemonik bisa membentuk dan mempengaruhi alam pikiran masyarakat? Secara sistematis ideologi hegemoni mencekoki individu dan masyarakat dengan pikiran-pikiran tertentu, doktrin-doktrin tertentu, bias-bias tertentu, sistem-sistem preferensi tertentu. (Ibrahim & Dedy D. Malik, 1997). Kekuasaan cenderung melakukan hegemoni makna terhadap kenyataan sosial. Contoh yang masih relevan saat ini adalah masalah pribadi yang berkaitan organ reproduksi perempuan dengan mudah diintervensi negara melalui program KB. Hak reproduksi perempuan dipasung atas nama pengendalian pertumbuhan penduduk, yang mengabaikan kenyataan bahwa yang paling berkepentingan dalam hal reproduksi tersebut adalah kaum perempuan itu sendiri.

Bila kita sepakat bahwa berorganisasi merupakan langkah strategis untuk pemberdayaan perempuan, maka dibutuhkan suatu analisis kritis untuk melihat besaran permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, yang dapat dijadikan agenda kegiatan dari beberapa organisasi yang ada. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu pemetaan kekuatan organisasi perempuan yang ada di setiap komunitas, sebagai data dasar dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan

dan realita yang ada.

Arti penting kegiatan pemetaan kekuatan kaum perempuan secara individual dan organisasi tentu tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan kaum perempuan sendiri, tetapi juga diharapkan mempunyai implikasi yang luas terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Karenanya, model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat mensyaratkan upaya pemberdayaan perempuan secara lebih serius, mengingat realita kondisi perempuan di Indonesia masih memprihatinkan. Realita kondisi perempuan di Indonesia masih diwarnai ketidak-adilan gender, dimana manifestasi ketidak-adilan gender, antara lain: (i) proses marginalisasi (pemiskinan ekonomi), (ii) subordinasi dalam distribusi kekuasaan, (iii) mitos, stereotipe, dan pelabelan negatif, (iv) beban kerja panjang dan berat, dan (v) kekerasan dalam berbagai bentuk.

Melalui aktivitas dalam kegiatan organisasi semacam koperasi misalnya, kaum perempuan mendapat manfaat tidak semata-mata pada bidang ekonomi saja, tetapi juga memberikan dampak yang luas pada hal-hal lain. Antara lain kemampuan berorganisasi, berhimpun dalam kelompok, yang semakin menguatkan kemampuan secara pribadi maupun secara kelompok. Kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan menjadi pemimpin, yang berarti kemampuan di bidang politik. Peningkatan ketrampilan dalam berbagai bidang, misalnya manajemen keuangan, tata-buku, komputer, komunikasi, dan lain lain.

Dengan mengikuti kegiatan organisasi apapun, baik sebagai anggota, terlebih-lebih sebagai pengurus, akan membuat seseorang perempuan mempunyai kemampuan untuk meingkatkan akses terhadap sumber, baik sumber ekonomi, politik, informasi, dan masih banyak lagi. Bagaimana akses terhadap sumber dapat dioptimalkan, semuanya terpulang pada kemampuan yang bersangkutan untuk memanfaatkan akses-akses atau peluang tersebut.

Macam-macam organisasi yang dapat dikategorikan sebagai organisasi yang bergerak pada pemberdayaan perempuan

- Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi: seperti Suara Ibu Peduli, serta beberapa Koperasi perempuan yang tersebar di seluruh tanah air,
- Organisasi yang bergerak di bidang politik dan hukum untuk advokasi kebijakan seperti Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Apik, dan lain-lain..
- Organisasi yang bergerak pada advokasi dan pendampingan pada isu kekerasan: Kalyana Mitra, Rifka Anissa, Savy Amira, dan lain-lain.
- Organisasi yang bergerak pada advokasi dan pendampingan terhadap kelompok khusus seperti: buruh, pekerja seks, anak-anak, dan lain-lain.

Spesifikasi suatu organisasi dalam menangani isu khusus pada kelompok sasarannya tidak berarti bahwa hanya satu kebutuhan saja yang dipenuhi, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Langkah-langkah

pemberdayaan perempuan pada dasarnya membutuhkan suatu pendekatan yang sifatnya komprehensif dan berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan gender secara praktis (jangka pendek) dan pemenuhan kebutuhan gender strategis (jangka panjang), secara bersama-sama dapat dipenuhi melalui penerapan kerangka pemberdayaan perempuan.

Pada kegiatan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi seperti koperasi misalnya, ada beberapa manfaat yang dapat memberikan indikasi bahwa berorganisasi merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan perempuan.

1. Secara ekonomi misalnya, kegiatan koperasi dapat memberikan manfaat bagi anggota untuk mengembangkan usaha, membantu ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendesak, mengatur kelancaran perputaran keuangan rumah tangga
2. Dari segi pendidikan, kegiatan dalam koperasi dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai hal, mulai dari manajemen keuangan hingga kemampuan berorganisasi. Pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang didapat dalam kegiatan koperasi akan membuka akses untuk berwiraswasta, terjun dalam kehidupan politik, mengembangkan diri pada dunia pendidikan, dan lain-lain.
3. Dari segi sosial, kegiatan koperasi akan membuka akses hubungan sosial yang luas, minimal dengan sesama anggota koperasi, belum lagi jaringan kerjasama yang dapat dibangun antar anggota sesuai kebutuhan bersama. Jaringan kerjasama dapat dimanfaatkan untuk saling *sharing* atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, serta berbagi solusi pemecahan. Paling tidak melalui kegiatan berkoperasi yang efektif dan berkesinambungan dengan program-program yang bersifat sensitip gender, diharapkan akan dapat mematahkan budaya bisu yang selama ini disosialisasikan melalui pewarisan budaya terhadap kaum perempuan. Setidaknya diharapkan akan muncul adanya kesadaran kolektif diantara kaum perempuan akan hak-haknya dan tumbuhnya kemauan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi
4. Dari segi psikologi, kegiatan koperasi akan memberikan rasa percaya diri pada perempuan secara pribadi, maupun kolektif. Akses dan kontrol yang muncul dalam proses keterlibatan dalam kegiatan koperasi akan membuat posisi tawar dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mantap, tanpa rasa bersalah, dengan rasa percaya diri yang kuat bahwa dirinya mampu. Mitos dan *stereotype* tentang sifat-sifat feminin yang dilekatkan pada perempuan yang tidak semuanya benar, perlu ditepis bukan dengan perkataan saja, tetapi perlu dibuktikan dengan kegiatan konkrit, bahwa perempuan

bisa mengambil keputusan yang rasional, tidak emosional, dan dapat menjadi pemimpin yang asertif atau tegas. Sebagaimana dibuktikan dalam pengamatan di lapangan, yang diperkuat oleh hasil penelitian Dr. Dewi Matindas dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam daya kemampuan, maupun daya ketidakmampuan sebagai manajer

5. Dari segi politik, kegiatan berorganisasi akan menaikkan posisi tawar menawar dalam berbagai bidang kehidupan, juga akan dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan untuk berbagai hal, termasuk pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Peningkatan kesadaran merupakan pendidikan politik dasar, yang diperoleh dari kegiatan berorganisasi.

Dari berbagai manfaat tersebut, intinya bahwa kegiatan berorganisasi, dimana koperasi sebagai salah satu contoh konkrit merupakan langkah strategis dan fungsional bagi upaya pemberdayaan perempuan. Disebut strategis karena mampu untuk meningkatkan peran perempuan sebagai upaya mengatasi ketertinggalannya dalam usaha pembangunan. Disebutkan fungsional untuk mempersempit kesenjangan gender yang berujung pada tegaknya tegaknya keadilan.

Setidaknya melalui kegiatan berorganisasi pada kaum perempuan diharapkan akan dapat:

1. Meningkatkan kondisi perempuan Indonesia yang menurut catatan berada di urutan 71 bila digunakan *Gender Empowerment Measurement (GEM)* yang mengukur sejauhmana partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan angka partisipasi sebagai pemanfaat program pembangunan yang selama ini masih sangat rendah (5% pada program padat karya JPS tahun 1998/1999).
3. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, yaitu 373 per 100.000 kelahiran.
4. Meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja agar setara dengan angkatan kerja laki-laki (kondisi saat ini: perempuan 43,5% dan laki-laki 72,6%)
5. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam politik, antara lain dengan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai anggota partai politik.
6. Meningkatkan keterwakilan dalam DPR (kondisi saat ini 9,8%).
7. Meningkatkan jumlah perempuan sebagai PNS, termasuk juga meningkatkan jumlah PNS perempuan yang mampu menempati jabatan struktural pada eselon III hingga I.

Semuanya ini dilakukan dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan paradigma baru pembangunan, dimana ada tiga isu kunci utama, yakni: (a) peningkatan kualitas hidup, (b) peran serta masyarakat, (c) pelestarian lingkungan. Tiga isu kunci itu tidak akan bermakna apa-apa

jika tidak dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan secara aktif dengan menerapkan kerangka pemberdayaan perempuan.

Aplikasi kerangka pemberdayaan perempuan

Pendekatan pemberdayaan perempuan lahir dari ketidakpuasan terhadap semua pendekatan yang sebelumnya. Pendekatan ini berangkat pada asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan kekuasaan tawar menawar untuk merubah nasibnya sendiri. Pendekatan pemberdayaan perempuan meletakkan upaya penghapusan subordinasi perempuan sebagai pusat perhatian, yang berarti bahwa kesamaan hak ekonomi, hak-hak resmi yang tidak diskriminatif, serta hak-hak reproduktif, masuk dalam agenda (Saptari & Holzner, 1997).

Konsep pemberdayaan perempuan mengandung paling tidak tiga pokok pikiran: (1) bersifat holistik, karena mencakup pemberdayaan dalam arti ekonomi, sosial-budaya, politik, dan psikologis, (2) diarahkan kepada penanggulangan hambatan struktural yang menghambat kemajuan perempuan dan terwujudnya kesetaraan gender, (3) dilaksanakan bersama-sama pemberdayaan laki-laki dan pemberdayaan masyarakat umumnya (Jang A. Muttalib, 1997).

Bagaimanakah seharusnya suatu organisasi bekerja, sehingga kegiatannya dapat memberi dampak pemberdayaan pada kaum perempuan? Salah satunya dan langkah awal yang perlu disegerakan adalah melalui kegiatan pemetaan kekuatan organisasi perempuan. Melalui kegiatan pemetaan tersebut, paling tidak dapat dilakukan kajian secara kritis pada organisasi-organisasi perempuan dalam peran dan fungsinya melakukan pemberdayaan perempuan.

Setidaknya melalui kerangka pemberdayaan yang disusun oleh Sarah Longwe (1991), dapat dilihat penerapan kerangka pemberdayaan perempuan yang meliputi lima tingkatan, yakni: (i) pemerataan tingkat kesejahteraan, (ii) pemerataan tingkat akses, (iii) pemerataan tingkat kesadaran, (iv) pemerataan tingkat partisipasi aktif, (v) pemerataan tingkat kontrol/penguasaan. Kelima tahap pemberdayaan perempuan harus dilihat tidak sebagai suatu proses yang linier, tetapi sebagai bagian yang saling berkaitan dari suatu siklus.

Melalui kegiatan dalam organisasi, secara langsung maupun tidak langsung, seorang perempuan akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan primer (sandang, papan, pangan), maupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan fisik non fisik ini merupakan kebutuhan dasar yang harus diutamakan dalam kehidupan masyarakat, dimana tanpa hal itu sulit untuk mengajak dan menyadarkan kaum perempuan akan hak-hak mereka.

Keikutsertaan secara aktif sebagai anggota organisasi dengan visi, misi yang jelas-jelas berpihak pada upaya

pemberdayaan perempuan, akan memberikan akses dan peluang yang terbuka bagi kaum perempuan untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mendadak seperti, biaya bila ada yang sakit, biaya sekolah, hingga untuk modal usaha. Lembaga koperasi misalnya, seringkali mengarahkan aktivitasnya juga untuk memberikan pendidikan ketrampilan pada anggotanya agar dapat mengelola uang yang diperoleh dari kegiatan koperasi secara lebih bermanfaat untuk usaha-usaha produktif. Dengan demikian, pinjaman yang diperoleh dari koperasi dapat dikembangkan sebagai kail atau pancing yang dapat dipakai secara terus menerus untuk mendapatkan ikan, dan tidak sekedar menjadi ikan yang hanya dapat dimanfaatkan satu kali saja dan langsung habis. Peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar yang tak dapat ditawar-tawar, dan harus menjadi prioritas. Setelah masalah kesejahteraan secara relatif terpenuhi, maka akan membuka akses yang luas pada yang bersangkutan untuk mendapat informasi, baik dalam akses pendidikan, akses pada layanan kesehatan, akses untuk rekreasi, serta kebutuhan-kebutuhan lain. Melalui aktivitas dalam organisasi kebutuhan memperluas akses terhadap sumber juga menjadi lebih berpeluang untuk semakin meningkat hari demi hari. Biasanya kesadaran akan hak dan kewajiban secara otomatis akan muncul ketika akses kepada berbagai sumber telah terpenuhi. Kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas diri, kesadaran akan hak dan kewajiban, kesadaran berpolitik, merupakan langkah ketiga yang diharapkan akan diperoleh ketika seseorang terlibat dalam kegiatan koperasi.

Kesadaran akan membuahkan peran serta secara aktif yang muncul dari kesadaran, dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa tekanan dari siapapun, dan dijalani dengan suatu pemahaman yang utuh, sadar, dan diyakini akan memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Peran serta aktif tidak akan tumbuh begitu saja, ia harus ditumbuhkan melalui kegiatan pendidikan yang merupakan paket penting dalam program kerja organisasi.

Melalui kegiatan berorganisasi juga diharapkan akan menumbuhkan kesadaran pentingnya mengambil keputusan, pentingnya meningkatkan posisi tawar dengan berbagai pihak, sehingga segala bentuk perlakuan tidak adil, diskriminasi jelas-jelas tidak mungkin dapat diterima atas nama apapun. Kegiatan demi kegiatan yang dijalani seseorang yang aktif dalam berorganisasi pada akhirnya memang diharapkan dapat memberikan dampak pada kemampuan menguasai *power*, yang berguna dalam pengambilan keputusan pada dirinya, sehingga terjadi hubungan yang setara, dan berkeadilan gender, yang akan menempatkan perempuan bukan lagi sekedar *kanca wingking* tetapi mitra sejajar. Dengan demikian, maka kondisi ideal yang diinginkan dapat dipenuhi, dimana kaum perempuan secara individu dan kelompok diperhitungkan sama pentingnya dengan gender laki-laki yang selama ini dianggap lebih unggul dan lebih hebat.

Otonomi daerah dan pembangunan berwawasan gender

Otonomi daerah mensyaratkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul. Kalau jumlah penduduk suatu wilayah, lebih dari separuhnya adalah perempuan, maka kebutuhan peningkatan kualitas SDM perempuan menjadi kebutuhan yang tak dapat ditunda-tunda lagi dalam menyongsong era otonomi daerah. Kalau selama ini laporan yang dihimpun oleh Badan-badan Dunia tentang kualitas SDM perempuan Indonesia masih dikategorikan pada kelompok rentan, belum sejahtera lahir dan batin, maka hal ini merupakan tantangan yang harus dapat diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

Peran serta masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan otonomi daerah. Apabila, SDM perempuan yang jumlahnya banyak tidak diberi kesempatan untuk peningkatan kualitas diri, apa jadinya dengan pembangunan yang ada? Kesadaran bahwa perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan, bahwa perlu adanya perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap kebutuhan gender perempuan harus ditumbuhkan dikalangan birkokrat, anggota dewan, serta masyarakat. Mengapa demikian? Tanpa adanya perencanaan pembangunan yang sensitif gender, dengan alokasi dana yang cukup, dan dengan kebijakan yang tidak diskriminatif, maka akan sulit dipenuhi upaya pemberdayaan perempuan.

Upaya pemberdayaan akan memberi dampak perubahan yang signifikan terhadap kaum perempuan agar dapat keluar dari kondisi kerentanan yang selama ini membelenggu. Kerentanan kondisi perempuan antara lain disebabkan oleh: (i) lebih banyak perempuan didera kemiskinan, (ii) lebih banyak perempuan kekurangan pendidikan dan ketrampilan, (iii) lebih banyak perempuan yang kekurangan akses informasi dan layanan atas kebutuhannya, (iv) lebih banyak perempuan kurang memegang kendali atas pengambilan keputusan menyangkut dirinya sendiri, maupun dalam keluarga dan masyarakat.

Melalui perencanaan pembangunan yang berwawasan gender sebagai titik awal kegiatan pemberdayaan perempuan diharapkan upaya mengatasi kerentanan perempuan dapat dilakukan. Penyusunan rencana pembangunan yang berwawasan gender sebagai program yang bersifat terpadu, melibatkan berbagai pihak, serta dilakukan secara berkesinambungan, membutuhkan suatu *political will* yang kuat dari pemerintah.

Dibutuhkan adanya kesediaan untuk membagi pengalaman dengan anggota masyarakat, menggali aspirasi, khususnya pada kaum perempuan. Untuk itu, dibutuhkan suatu wadah, berupa forum komunikasi antar pelaku pembangunan, termasuk kaum perempuan sebagaimana dituangkan pada pasal 92 dalam UU no 22 tentang Otonomi Daerah. Kebutuhan itu dapat dipenuhi apabila perempuan telah berperan secara aktif sebagaimana warga masyarakat laki-laki, antara lain melalui keterlibatan dalam forum-forum

Pembangunan Kota.

Pembangunan berwawasan gender bisa menjadi solusi pemecahan bila: (a) dilakukan secara sungguh-sungguh, (b) melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk kaum perempuan, dan (c) dilakukan secara berkesinambungan. Tanpa adanya kesungguhan, maka upaya pemberdayaan perempuan hanyalah menjadi slogan semata, yang hanya "sukses" ditataran pencanangan. Sebagaimana ditulis dalam harian Kompas beberapa waktu yang lalu, yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan masih berada dalam tataran jargon semata.

Peran strategis perempuan kini dan masa yang akan datang menuntut suatu pendefinisian pembangunan yang melibatkan kepentingan dan kebutuhan perempuan sebagai bagian yang tak tak dapat dilepaskan dari suatu kegiatan pembangunan masyarakat. Langkah aksi afirmatif telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga. Termasuk program pemerintah yang baru dalam program JPS khusus perempuan, yang dinamakan Prakarsa Khusus untuk Penganggur Perempuan (PKPP). Program PKPP disusun dengan keinginan agar sensitif gender, sebagai suatu perubahan terhadap program-program yang ditujukan pada perempuan semala ini seperti Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Kesejahteraan Keluarga (P2W-KSS), program peningkatan peranan ibu dalam membina perkembangan balita, yang dikenal dengan program Bina Keluarga Balita (BKB), yang dirancang pada tahun '70-an. Berikutnya, adalah semakin memarakan upaya peningkatan kedudukan dan peranan wanita (P2W), dimana salah satu indikator yang dapat dilihat adalah langkah dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah, dan berkembangnya Pusat Studi Wanita di berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, muncul LSM-LSM yang merupakan wadah perjuangan aktivis perempuan muda, yang bersuara lantang menggugat sebab-sebab mendasar dari subordinasi dan marginalisasi perempuan, dengan menawarkan alternatif aksi yang berbeda dari program P2W-nya pemerintah (baca: Jang Aisjah Muttalib, 1997).

Peran pranata lokal dalam pemberdayaan kaum perempuan

Pada tulisan di atas telah ditunjukkan bagaimana organisasi perempuan memberikan kontribusi bagi seseorang ataupun kelompok perempuan dalam memperoleh manfaat untuk melakukan pemberdayaan. Dengan demikian, tak dapat dipungkiri bahwa secara relatif beberapa organisasi telah mampu menjawab tantangan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam pemberdayaan perempuan, sebuah organisasi harus tumbuh menjadi lembaga yang independen, mandiri, tanpa intervensi yang terlalu besar dari pemerintah. Tanpa kemandirian, akan sulit bagi sebuah organisasi untuk dapat memandirikan anggotanya. Hubungan yang bersifat setara harus diciptakan, dan bukan hubungan yang bersifat saling

mengeksploitasi.

Bila dikaji beberapa organisasi lokal seperti koperasi yang telah berhasil menghimpun anggota maupun modal, dan dapat menyalurkan pinjaman tanpa tunggakan yang berarti, bukankah ini merupakan potensi yang luar biasa dalam upaya pemberdayaan perempuan? Mengingat peluang usaha dimasa depan adalah usaha-usaha kecil skala rumah tangga, maka peluang koperasi di masa depan akan semakin meningkat.

Organisasi-organisasi di tingkat lokal harus dapat menjadi kekuatan sosial, politik dan sekaligus ekonomi bagi anggotanya. Dengan basis kekuatan lokal, namun mempunyai jangkauan global, akan memberi peluang yang lebih besar pada kaum perempuan untuk meningkatkan posisi tawar dalam berbagai bidang. Setidaknya melalui kegiatan berorganisasi, akan memberi peluang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di kalangan perempuan, yang selama ini sangat langka, karena berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang berasal dari nilai-nilai budaya dapat dicoba diatasi antara lain dengan melakukan redefinisi dan resosialisasi tentang upaya pemberdayaan yang bersifat holistik. Ini berarti juga dibutuhkan adanya penyadaran wawasan gender pada masyarakat secara terus menerus, dimana saja, dan kapan saja (*always gender*)

Kearifan yang ada pada masing-masing budaya dapat dipakai sebagai dasar pemikiran meningkatkan peran serta perempuan di setiap komunitas. Organisasi yang telah mapan dapat membantu organisasi pemula dengan memfasilitasi dan mendampingi tumbuhnya organisasi-organisasi baru tersebut. Peran pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator yang mendukung tumbuh kembangnya berbagai organisasi tersebut.

Nilai-nilai budaya yang memberi nilai positif untuk memberdayakan perempuan perlu digali dan disosialisasikan kembali. Kisah-kisah keperkasaan dan kepahlawanan tokoh perempuan semacam Dewi Sartika, Kartini, Cut Nyak Dhien, dan lain-lain perlu disosialisasikan pikiran-pikiran dan sepak terjangnya dalam memperjuangkan kaumnya. *Folklore-folklore* yang tersebar dalam setiap kebudayaan dapat digali kembali untuk mengidentifikasi cerita rakyat yang memberikan gambaran kemampuan perempuan untuk *survive* dalam setiap masyarakat (baca: Danandajaja, 1984). Kalaupun cerita model *Puteri Cinderella* lebih populer di kalangan masyarakat, toh pasti dapat digali cerita lain yang menggambarkan sisi lain perempuan. Di tengah kuatnya hegemoni patriarki yang mempunyai kecenderungan melakukan kekerasan demi kekerasan yang secara sadar maupun tidak telah diperkuat oleh negara, maka penggalian kearifan tradisi lokal yang berpihak pada upaya pemberdayaan perempuan tanpa adanya rekayasa oleh kepentingan apapun, menjadi suatu yang bermanfaat. Dalam hal ini konsep etnosentrisme dan relativisme kebudayaan dapat diterapkan dalam memahami konstruksi sosial budaya masyarakat tentang peran dan kedudukan perempuan dalam setiap komunitas.

Peranan organisasi lokal dan penggalian kearifan tradisi lokal dalam pemberdayaan kaum perempuan merupakan hal yang sangat penting, strategis dan amat fungsional dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini kegiatan organisasi ekonomi semacam koperasi dapat dijadikan model pemberdayaan bagi kaum perempuan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Untuk itu perlu dirumuskan secara lebih konkrit bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang perlu diadakan, sehingga keterlibatan kaum perempuan akan selalu menjadi suatu kegiatan pemberdayaan yang utuh, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas dirinya secara pribadi maupun kelompok.

Dapat dirumuskan bahwa program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan berorganisasi di tingkat lokal bertujuan untuk:

1. meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan sebagai partisipan aktif.
2. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal, yang berarti juga meningkatkan kualitas SDM pengurusnya melalui berbagai kegiatan pelatihan yang berisi berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan (hukum, politik, komunikasi, komputer, bahasa asing, manajemen usaha, dan lain-lain).
3. Meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar, meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar dalam rangka menunjang kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
5. Meningkatkan kemampuan untuk menguasai sumber-sumber penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain dalam wujud penguasaan sumber informasi, serta mendistribusikan seluas mungkin sumber-sumber informasi terutama yang mempunyai dampak bagi peningkatan kualitas SDM kaum perempuan.

Dalam konteks pembangunan, secara lebih luas pemberdayaan perempuan diharapkan dapat:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam program pembangunan sebagai partisipan aktif.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, usaha kecil, menengah, maupun besar.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan perempuan.

Rumusan program pemberdayaan perempuan dalam kegiatan berorganisasi di tingkat lokal mendesak dilakukan untuk lebih mengoptimalkan langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan. Melalui forum seminar, lokakarya, serta

pelatihan-pelatihan dapat dikonkritkan panduan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan organisasi dengan menggunakan perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Apa yang telah dijalankan oleh masing-masing organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dapat dijadikan masukan untuk menyusun model pemberdayaan perempuan secara holistik dan komprehensif (Saptandari, 2000).

Keragaman sosial-budaya, keragaman jenis pekerjaan, dan lingkungan perlu diperhitungkan dalam menyusun panduan pemberdayaan perempuan. Organisasi perempuan yang dibutuhkan di daerah pertanian, di daerah nelayan, dan di daerah perkotaan tentu berbeda. Heterogenitas dan kompleksitas kelompok perempuan dalam masyarakat harus diwadahi, antara lain melalui pendekatan partisipatori agar tingkat penerimaan dalam upaya pemberdayaan perempuan dapat semakin meningkat. Bagaimana realita pemberdayaan perempuan dapat dijalankan? Semuanya terpulung pada kemauan baik dari semua pihak, pemerintah (pusat dan daerah), organisasi-organisasi semacam LSM, Pusat-pusat Studi Wanita, dan lain-lain pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pentingnya pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Kesimpulan

Melalui uraian demi uraian dalam makalah ini, secara sederhana dapat ditarik simpulan, bahwa:

1. Upaya pemberdayaan perempuan melalui kegiatan dalam organisasi di tingkat lokal merupakan langkah strategis dan fungsional dalam rangka mempersempit kesenjangan gender dan meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam berbagai bidang.
2. Peluang organisasi lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan sangat terbuka, penting, dan dapat ditingkatkan untuk memberi manfaat lebih besar di masa depan.
3. Arah gerakan organisasi ke depan harus mampu memberi peluang pemberdayaan perempuan secara komprehensif dan berkesinambungan.
4. Perencanaan program serta kegiatan dalam berorganisasi harus didasarkan pada suatu perencanaan program yang berwawasan gender, yang dapat memenuhi kebutuhan praktis (jangka pendek) maupun kebutuhan strategis (jangka panjang), dan dapat menjadi wahana untuk mencari pemecahan masalah serta mempunyai unsur meningkatkan kesadaran.
5. Lembaga-lembaga lokal di tingkat kampung yang selama ini hanya bergerak disatu bidang saja, misalnya kegiatan sosial saja, keagamaan saja, dapat ditingkatkan kemampuannya untuk menjadi lembaga pemberdayaan perempuan secara komprehensif bila menerapkan kerangka pemberdayaan perempuan.
6. Pemetaan kekuatan organisasi perempuan di tingkat lokal berikut SDM-nya mempunyai arti yang penting dan strategis, dimana jaringan kerja antara organisasi yang

ada, baik yang telah mapan dengan yang baru muncul dapat diidentifikasi.

7. Kearifan budaya lokal yang tercermin pada pranata-pranata yang ada perlu digali sebagai dasar pemikiran pengembangan organisasi perempuan yang bertindak sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan. Hambatan-hambatan yang berasal dari nilai-nilai kebudayaan diidentifikasi untuk dapat dijadikan refleksi bersama dalam menyusun suatu konstruksi sosial baru yang lebih menggambarkan keadilan dan kesetaraan gender hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Kepustakaan

Danandjaja, James

- 1984 *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

Ibrahim Idy Subandy & Djamaludin Malik, D. (eds)

- 1997 Pengantar Editor Mencerahkan akal Budi dalam Sangkar Hegemoni', dalam *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta, yayasan Bentang Budaya.

Muttalib, Jang Aisjah

- 1997 'Pemberdayaan Wanita: Antara Harapan dan Kenyataan', dalam Masinambow E.K.M. (eds) *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, Jakarta: Asosiasi Antropologi Indonesia & Yayasan Obor Indonesia.

Saptari, Ratna & Holzner, B.

- 1977 *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Suatu Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Saptandari, Pinky

- 2000 Pemberdayaan Perempuan: Tantangan dan Peluang di Tengah Hegemoni Patriarki, makalah yang disampaikan dalam 'Seminar Nasional Pemberdayaan Perempuan', diselenggarakan oleh Pusat Studi wanita UPN Veteran Jawa Timur dan BKKBN Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 9 Mei 2000.

Weiringa, Saskia Eleonora

- 1999 *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Kalyana Mitra dan Garba Budaya.